



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 2

TAHUN : 2011

SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 687.317.459.589,32 bertambah sejumlah Rp.159.796.320.045,41 sehingga menjadi Rp.847.113.779.634,73 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan						
	1. Semula	Rp	654.775.796.493,77				
	2. Bertambah	Rp	127.812.631.923,68				
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp	782.588.428.417,45		
b.	Belanja						
	1. Semula	Rp	682.291.108.304,52				
	2. Bertambah	Rp	159.796.320.045,41				
	Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp	842.005.801.997,93		
	Defisit setelah Perubahan			Rp	59.498.999.932,48		

c.	Pembiayaan			
	1. Penerimaan			
	a) Semula	Rp	32.541.663.095,55	
	b) Bertambah	Rp	31.983.688.121,73	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	64.525.351.217,28	
	2. Pengeluaran			
	a) Semula	Rp	5.026.351.284,80	
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	5.026.351.284,80	
	Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	59.498.999.932,48	
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.	Pendapatan asli daerah			
	1. Semula	Rp	49.588.455.261,35	
	2. Bertambah	Rp	1.325.184.740,10	
	Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp	50.913.640.001,45	
b.	Dana perimbangan			
	1. Semula	Rp	515.782.023.234,00	
	2. Bertambah	Rp	1.269.598.267,00	
	Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp	517.051.621.501,00	
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
	1. Semula	Rp	89.405.317.998,42	
	2. Bertambah	Rp	125.217.848.916,58	
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	214.623.166.915,00	

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pajak Daerah			
	1. Semula	Rp	4.221.987.732,92	
	2. Bertambah	Rp	786.073.062,60	
	Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp	5.008.060.795,52	
b.	Retribusi Daerah			
	1. Semula	Rp	9.519.209.100,00	
	2. Berkurang	Rp	385.860.100,00	
	Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp	9.133.349.000,00	
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
	1. Semula	Rp	5.411.131.988,34	
	2. Berkurang	Rp	474.652.956,81	
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	4.936.479.031,53	
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
	1. Semula	Rp	30.436.126.440,09	
	2. Bertambah	Rp	1.399.624.734,31	
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp	31.835.751.174,40	

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Dana bagi hasil pajak/bukan pajak			
	1. Semula	Rp	23.190.385.234,00	
	2. Bertambah	Rp	1.480.871.267,00	
	Jumlah dana hasil pajak/bukan pajak setelah Perubahan	Rp	24.671.256.501,00	
b.	Dana Alokasi Umum			
	1. Semula	Rp	444.247.738.000,00	
	2. Berkurang	Rp	203.873.000,00	
	Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp	444.043.865.000,00	

c. Dana alokasi khusus			
1. Semula	Rp	48.343.900.000,00	
2. Berkurang	Rp	7.400.000,00	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp		48.336.500.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis:

a. Pendapatan Hibah			
1. Semula	Rp	2.435.217.975,00	
2. Bertambah	Rp	8.251.882.500,00	
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp		10.687.100.475,00
b. Dana Darurat			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp		0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi			
1. Semula	Rp	23.467.885.623,42	
2. Bertambah	Rp	6.040.926.376,58	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp		29.508.812.000,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
1. Semula	Rp	51.502.214.400,00	
2. Bertambah	Rp	110.925.040.040,00	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp		162.427.254.440,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1. Semula	Rp	12.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	Rp		12.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung			
1. Semula	Rp	505.191.967.560,52	
2. Bertambah	Rp	46.755.082.746,41	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp		551.947.050.306,93
b. Belanja Langsung			
1. Semula	Rp	177.099.140.744,00	
2. Bertambah	Rp	113.041.237.299,00	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp		290.140.378.043,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah			
1. Semula	Rp	453.881.452.831,00	
2. Bertambah	Rp	39.569.780.722,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		493.451.233.553,00
b. Belanja bunga			
1. Semula	Rp	78.954.171,62	
2. Berkurang	Rp	21.774.289,86	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp		57.179.881,76
c. Belanja subsidi			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp		0,00
d. Belanja hibah			
1. Semula	Rp	15.440.999.025,00	
2. Bertambah	Rp	2.899.182.800,00	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp		18.340.181.825,00

e.	Belanja bantuan sosial			
	1. Semula	Rp	9.969.657.500,00	
	2. Bertambah	Rp	3.061.801.997,00	
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp 13.031.459.497,00
f.	Belanja bagi hasil			
	1. Semula	Rp	1.338.889.892,00	
	2. Bertambah	Rp	534.300.326,42	
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp 1.873.190.218,42
g.	Belanja bantuan keuangan			
	1. Semula	Rp	22.982.014.140,90	
	2. Berkurang	Rp	288.896.683,00	
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp 22.693.117.457,90
h.	Belanja tidak terduga			
	1. Semula	Rp	1.500.000.000,00	
	2. Bertambah	Rp	1.000.687.873,85	
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp 2.500.687.873,85

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja pegawai			
	1. Semula	Rp	28.481.991.832,00	
	2. Bertambah	Rp	10.983.569.816,00	
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp 39.465.561.648,00
b.	Belanja barang dan jasa			
	1. Semula	Rp	71.524.449.255,00	
	2. Bertambah	Rp	39.808.692.051,00	
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp 111.333.141.306,00

c.	Belanja modal			
	1. Semula	Rp	77.092.699.657,00	
	2. Bertambah	Rp	62.248.975.432,00	
	Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp 139.341.675.089,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan			
	1. Semula	Rp	32.541.663.095,55	
	2. Bertambah	Rp	31.983.688.121,73	
	Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp 64.525.351.217,28
b.	Pengeluaran			
	1. Semula	Rp	5.026.351.284,80	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp 5.026.351.284,80

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya			
	1. Semula	Rp	30.792.988.747,55	
	2. Bertambah	Rp	31.897.889.806,73	
	Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp 62.690.878.554,28
b.	Pencairan dana cadangan			
	1. Semula	Rp	0,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp		0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp		0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp		0,00
f. Penerimaan piutang daerah			
1. Semula	Rp	1.748.674.348,00	
2. Bertambah	Rp	85.798.315,00	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp		1.834.472.663,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp		0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
1. Semula	Rp	4.934.964.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan	Rp		4.934.964.000,00

c. Pembayaran utang pokok			
1. Semula	Rp	91.387.284,80	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp		91.387.284,80
d. Pemberian pinjaman daerah			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan	Rp		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
8. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 September 2011

BUPATI KULON PROGO,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

ttd

BUDI WIBOWO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI A**